

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN

---



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT KEUANGAN POLRI**



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI  
NOMOR: KEP/11/II/2025 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI  
Nomor: Kep/11/II/2025

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN POLRI

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang perubahan kelima atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Rancangan Rencana strategis Pusat Keuangan Polri Tahun 2020-2024.
- Memperhatikan : saran dan pertimbangan staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN .....



2 KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI  
NOMOR : KEP/11/II/2025  
TANGGAL: 4 FEBRUARI 2025

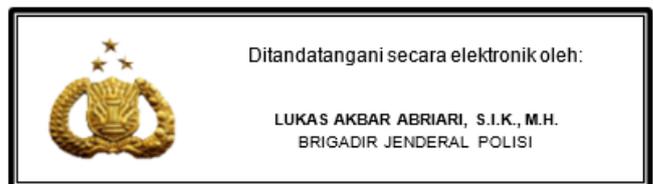
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI NOMOR KEP/11/II/2025 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN POLRI.

1. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pusat Keuangan Polri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman Indikator Kinerja Utama dan anggaran jajaran Keuangan Polri.
2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 4 Februari 2025

\_\_\_\_\_  
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



1. Nama Unit Organisasi / Satker: Pusat Keuangan Polri
2. Tugas : Menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di Lingkungan Polri.
3. Fungsi :
  - a. Pelaksana fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan, strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri;
  - b. Pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;
  - c. Perumusan dan/atau pengembangan sistem, metoda dan pedoman akuntansi dan keuangan Polri;
  - d. Pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan;
  - e. Pelaksana verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di wilayah;
  - f. Pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes Polri;
  - g. Pengelolaan informasi dan dokumentasi.

#### PERANAN

Puskeu Polri berperan menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di Lingkungan Polri.

INDIKATOR .....



INDIKATOR KINERJA PENUNJANG  
PUSKEU POLRI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.	IKU. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Polri.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	<b>Definisi:</b> Opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) merupakan suatu penilaian profesional dari auditor negara mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk satu tahun anggaran, dengan mengacu pada empat kriteria, yakni kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),	Nilai	▪ Bid APK

Kecukupan .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>kecukupan pengungkapan informasi keuangan (<i>full disclosure</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).</p> <p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> <p>Penilaian dilakukan oleh BPK RI Berdasarkan Laporan Keuangan Polri.</p>		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
		IKP 1. Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji.	92%	93%	94%	95%	96%	<b>Definisi:</b> <b>Tepat Saji:</b> Laporan keuangan harus disusun dengan akurat, memenuhi standar akuntansi yang berlaku, serta memuat informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Ketidaksesuaian dengan standar atau kesalahan dalam informasi akan mempengaruhi nilai persentase tepat saji merujuk pada	% (Persentase)	▪ Bid APK; Bidkeu I dan Bidkeu II



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) Kriteria kesesuaian berdasarkan SAP yang dijelaskan pada 98 <i>point</i>.</p> <p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah LK yang dilaporkan secara tepat saji dan tepat waktu tanpa ada revisi Major}}{\text{Jumlah seluruh LK Satker}} \times 100\%$		



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
2	Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	IKP 2. Jumlah NPHPW yang diterbitkan di lingkungan Polri.	280 NPHPW	300 NPHPW	320 NPHPW	340 NPHPW	380 NPHPW	<b>Definisi:</b> Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bidverif Puskeu dan ditandatangani oleh Kapuskeu setelah dilakukannya finalisasi terhadap kegiatan pemeriksaan dokumen Perwabkeu dan diterbitkannya Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW) atas kegiatan tersebut oleh Bidkeu.	Jumlah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bid Verif; Bidkeu I dan Bidkeu II</li> </ul>

Setelah .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								Setelah diterbitkan oleh Bidverif, NPHPW diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan tembusan kepada Irwasum Polri dan Kapolda (untuk Satker Kewilayahan) jika pekerjaan sudah selesai dan Perwabkeu lengkap dan benar dalam verifikasi jika tidak ditemukan kekurangan atau kesalahan dalam dokumen Pertanggungjawaban Keuangan.		

Rumus .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:  Jumlah NPHPW yang diterbitkan (Satker Mapolda, Polres dan Mabes).		
		IKP 3. Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian.	15%	25%	35%	45%	55%	<b>Definisi:</b> Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam	% (Persentase)	▪ Bid Verif;

Mendukung .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>mendukung keandalan Pelaporan Keuangan serta secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.</p> <p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah Satker yang memperoleh Penilaian Efektif atau Efektif dengan pengecualian}}{\text{Jumlah Satker yang melakukan penilaian PIPK}} \times 100\%$		

Terwujudnya .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
3	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel.	IKP 4. Persentase Penyelesaian Transfer keluar Transfer masuk (TKTM).	100%	100%	100%	100%	100%	<p><b>Definisi:</b> Transfer Keluar mengacu pada perpindahan dana atau aset dari rekening atau kas Pusat Keuangan Polri menuju ke pihak eksternal. Ini bisa berupa pembayaran tagihan, gaji pegawai, pembelian barang atau jasa, atau transfer ke rekening pihak ketiga lainnya.</p> <p>Transfer Masuk adalah mengacu pada aliran dana atau aset yang masuk ke rekening atau kas Pusat Keuangan Polri. Dana ini berasal dari berbagai sumber baik dari PLN</p>	% (Persentase)	▪ Bid Bia

maupun .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>maupun PDN dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Polri.</p> <p>Pengadaan/Proyek adalah merujuk pada kegiatan perolehan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi untuk memenuhi kebutuhan institusi kepolisian. Ini bisa berupa pengadaan kendaraan operasional, senjata, peralatan komunikasi, pembangunan markas, dan berbagai kebutuhan lainnya yang mendukung tugas-tugas kepolisian.</p>		

Pengadaan/proyek .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>Pengadaan/proyek dikatakan selesai jika proses pengadaan atau proyek tersebut telah menghasilkan Asset (BMN) untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian TKTM. Adapun penyelesaian TKTM diawali dengan proses Transfer Keluar yang dilakukan oleh Puskeu Polri untuk kemudian dilakukan pencatatan Transfer Masuk oleh Satker Pelaksana Pengadaan. Keseluruhan proses tersebut dicatat dalam aplikasi SAKTI.</p>		

Jumlah .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>Jumlah keseluruhan pengadaan proyek dihitung 1 (satu) tahun ke belakang sejak Tahun Anggaran Berjalan (TAB).</p> <p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah penyelesaian TKTM atas pengadaan/proyek dalam 1 Tahun anggaran berjalan}}{\text{Jumlah keseluruhan pengadaan/proyek dalam 1 Tahun anggaran berjalan}} \times 100\%$		

Terwujudnya .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
4	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabas dan Wilayah.	IKP 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri.	95,25	95,5	95,75	96	96,25	<b>Definisi:</b> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA, ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di lingkungan Polri, termasuk tingkat kepatuhan terhadap regulasi, kecepatan penyerapan anggaran, dan kualitas tata kelola keuangan. IKPA ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI	Nilai	▪ Bid Dal

sebagai .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								sebagai alat monitoring kinerja Satker (satuan kerja) pemerintah dalam penggunaan anggaran negara, dan Polri menggunakannya untuk mengevaluasi kinerja anggarannya di tingkat Pusat dan Daerah, hal ini diatur oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan		

anggaran .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Adapun indikator IKPA dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.</p> <p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> <p>Penilaian dari Kementerian Keuangan, Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai</p>		

dengan .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut: (2022)</p> <p>Revisi DIPA : 10 % ,            Deviasi Halaman III DIPA : 10 % ,            Penyerapan Anggaran : 20 % ,            Belanja Kontraktual : 10 % ,            Penyelesaian Tagihan : 10 % ,            Pengelolaan UP dan TUP : 10 % ,            Dispensasi SPM : 5 % ,            Capaian Output : 25 %.</p>		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
		IKP 6. Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA $\geq 93,75$ .	80%	81,5%	83%	85%	87%	<b>Definisi:</b> Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai kinerja dan bobot dari	% (Persentase)	▪ Bid Dal; Bidkeu I; Bidkeu II

seluruh .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>seluruh indikator kinerja berdasarkan data transaksi yang dilakukan pada tingkat Satker (2020-2024) hal ini mengacu pada ketentuan IKPA yang baru. (2025-2029).</p> <p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah Satker yang mendapat nilai IKPA} \geq 93,75}{\text{Jumlah seluruh Satker Polri}} \times 100\%$		

Tata .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
5	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	IKP 7. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri.	80,1 (A)	80,2 (A)	80,3 (A)	80,4 (A)	80,5 (A)	<p><b>Definisi:</b>            Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah nilai evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Polri yang diberikan oleh Itwasum Polri melalui Laporan Hasil Evaluasi SAKIP K/L/PD. Evaluasi atas implementasi SAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah (yaitu Polri) mengimplementasikan</p>	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Set Puskeu (Subbagren)</li> </ul>

SAKIP-nya .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>SAKIP-nya, sekaligus mendorong peningkatan pencapaian kinerja Polri yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Sesuai dengan Permen PANRB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komponen dan bobot dalam evaluasi manajemen kinerja atas implementasi SAKIP ditetapkan, yaitu:</p> <p>X1 = Perencanaan Kinerja (Bobot: 30%),  X2 = Pengukuran Kinerja (Bobot: 30%),  X3 = Pelaporan Kinerja (Bobot: 15%),</p>		

X4 = Evaluasi .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>X4 = Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot:25%)</p> <p>Nilai AKIP yang diperoleh pada tahun berjalan merupakan hasil penilaian atas evaluasi dokumen SAKIP tahun sebelumnya.</p> <p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> <p>Nilai AKIP Puskeu Polri oleh Itwasum Polri.</p>		

IKP 8 .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
		IKP 8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri.	76,5	76,6	76,7	76,8	76,9	<b>Definisi:</b> Nilai Kinerja Anggaran Definisi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan dari komponen pembentuk, yaitu: 1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari aplikasi Sistem <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan bobot 50%. 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari aplikasi <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dengan bobot 50%.	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Set Puskeu (Subbagren); Urkeu</li> </ul>

Evaluasi .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 Pasal 249 Ayat (7) tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.</p> <p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.</p>		

Data .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini :</p> <p>X1: Data dari Aplikasi Sistem <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART DJA Kemenkeu RI)</p> <p>X2: Data dari Aplikasi <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Puskeu (DJPb Kemenkeu RI).</p> <p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> <p>Nilai NKA = <math>\sum_{i=1}^2 W_i \cdot X_i</math></p> <p>NKA : Nilai Kinerja Anggaran</p> <p>W<sub>i</sub> : Bobot dari komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran (W<sub>1</sub>=50%, W<sub>2</sub>=50%)</p> <p>X<sub>i</sub> : Nilai indeks masing-masing komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran</p>		

IKP 9 .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
		IKP 9. Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan.	60%	65%	70%	75%	80%	<p><b>Definisi:</b> Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi (Sesuai Prodik/Prolat Lemdiklat, atau yang dilakukan secara mandiri). Ruang lingkup indikator ini terbatas pada sertifikasi kompetensi fungsi keuangan yang dilaksanakan oleh Puskeu Polri Jumlah total SDM fungsi keuangan mengacu</p>	% (Persentase)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Set Puskeu (Subbag sumda)</li> </ul>

pada .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>pada kondisi ideal yakni di setiap Satker perlu memiliki setidaknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 (dua) Pejabat Pembuat Komitmen (Pencairan Anggaran)</li> <li>2. 2 (dua) Pejabat Penandatanganan Surat (Perintah Pembayaran)</li> <li>3. 1 (satu) Bendahara Pengeluaran</li> <li>4. 1 (satu) Bendahara Penerimaan</li> <li>5. 2 (dua) Calon Bendahara Pengeluaran</li> </ol> <p>Target dari indikator kinerja ini mengukur jumlah kumulatif SDM fungsi keuangan yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang keuangan</p>		

Rumus .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah SDM Fungsi Keuangan yang memiliki sertifikat Keuangan}}{\text{Jumlah total SDM Fungsi Keuangan}} \times 100\%$ <p>*Jumlah total SDM fungsi keuangan mengacu pada kondisi ideal yakni di setiap satker perlu memiliki setidaknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 (dua) Pejabat Pembuat Komitmen (Pencairan Anggaran)</li> <li>2. 2 (dua) Pejabat Penandatanganan Surat (Perintah Pembayaran)</li> <li>3. 1 (satu) Bendahara Pengeluaran</li> <li>4. 1 (satu) Bendahara Penerimaan</li> <li>5. 2 (dua) Calon Bendahara Pengeluaran</li> </ol>		

IKP 10 .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
		IKP 10. Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri.	71	72	73	74	75	<p><b>Definisi:</b> Indeks Profesionalitas SDM Polri adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Slog Polri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polri. Aspek penilaian Indeks Profesionalitas SDM Slog Polri dinilai dengan</p>	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Set Puskeu (Subbag sumda)</li> </ul>

membobotkan .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>membobotkan serta menggabungkan beberapa aspek diantaranya :</p> <p>K: LKIP bagi anggota Polri dan aplikasi penilaian kinerja BKN bagi PNS Polri dan PPPK Polri sebesar 30%</p> <p>D: Data pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin PNPP dari Divpropam Polri sebesar 30%</p> <p>R: Data e-rohani dari Bagbinreligi SSDM Polri sebesar 9%</p> <p>P: Data skor psikologi dari Ropsi SSDM Polri sebesar 9%</p>		

Kes .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>Kes: Data hasil pemeriksaan kesehatan dari Pusdokkes sebesar 8%</p> <p>J: Data Bagbinjas SSDM Polri sebesar 7%</p> <p>Ak: Data kualifikasi dari aplikasi SSDM Polri, Data kompetensi prestasi Dikbangpers dari laporan Lemdiklat sebesar 7%.</p> <p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> $= (0,3K + 0,3D + 0,09R + 0,09P + 0,08 \text{ Kes} + 0,07 \text{ J} + 0,07 \text{ Ak})$		

IKP 11 .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
		IKP 11. Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri.	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	<b>Definisi:</b> Jumlah pelaksanaan Anev dihitung berdasarkan frekuensi evaluasi yang dilakukan oleh Subbagbinfung Set Puskeu Polri dalam periode tertentu serta hasilnya digunakan sebagai salah satu indikator kinerja Puskeu Polri dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas sistem keuangan di Polri. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam penerapannya untuk menjaga kerelevansian	Jumlah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Set Puskeu (Subbag binfung)</li> </ul>

dan .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								dan memastikan bahwa sistem dan metode lain di luar SOP Bid Dal, dan prosedur yang digunakan tetap efektif, efisien, dan relevan dalam mendukung pengelolaan anggaran dan keuangan Polri. Pelaksanaan Anev secara rutin juga membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan mengurangi risiko dalam pelaporan dan pelaksanaan anggaran.		

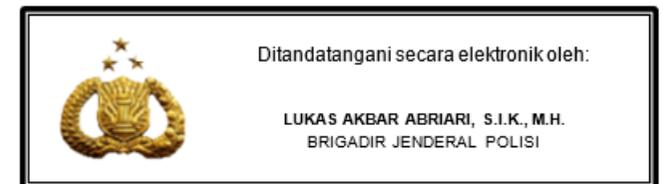
Rumus .....



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025	2026	2027	2028	2029			
								<p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> <p>Jumlah pelaksanaan Anev dokumen pembinaan fungsi di lingkungan Puskeu Polri.</p>		

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 4 Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN

---



# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT KEUANGAN POLRI

**PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI - UTAMA</b>								
SS 1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.	IKU	<p>Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Polri.</p> <p><b><u>RUMUS :</u></b> Penilaian dilakukan oleh BPK RI Berdasarkan Laporan Keuangan Polri.</p> <p><b><u>TIPE PERHITUNGAN :</u></b> Nilai.</p> <p><b><u>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</u></b> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis:</p> <p>a) <b>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau <i>Unqualified Opinion</i>);</b></p> <p>b) <b>Wajar Dengan Pengecualian (WDP atau <i>Qualified Opinion</i>);</b></p> <p>c) <b>Tidak Wajar (TW atau <i>Adverse Opinion</i>);</b></p> <p>d) <b>Tidak Memberikan Pendapat (TMP atau <i>Disclaimer Opinion</i>)</b></p> <p>Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).</p> <p><b>Opini WTP</b> merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan, dimana ini bisa tercapai apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:</p> <p>1. Bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, dan pemeriksa telah melaksanakan</p>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

1. Bukti .....



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI – UTAMA</b>						
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi;</li> <li>2. Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan;</li> <li>3. Seluruh laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan) telah lengkap disajikan;</li> <li>4. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).</li> </ol> <p>Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut.</p>					
	<p>IKP 1 Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji.</p> <p><b><u>RUMUS :</u></b>  <i>Jumlah LK yang dilaporkan secara tepat saji dan tepat waktu tanpa ada revisi Major</i>  <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> X 100%  <i>Jumlah seluruh LK Satker</i></p> <p><b><u>TIPE PERHITUNGAN :</u></b>            % (Persentase).</p>	92%	93%	94%	95%	96%

**ALASAN .....**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI – UTAMA</b>						
	<p><b><u>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tepat Saji (<i>Fair Presentation</i>) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAP) mengacu pada penyajian informasi keuangan yang bebas dari kesalahan material, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Informasi yang disajikan harus sesuai dengan realitas ekonomi yang terjadi dan tidak menyesatkan pengguna Laporan Keuangan.</li> <li>▪ Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.</li> </ul> <p>Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.</p>					

Empat .....



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI – UTAMA</b>								
			Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:  a) Pertimbangan Sehat b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan; c) Substansi Mengungguli Bentuk Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian;					
SS 2	Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	IKP 2	Jumlah NPHPW yang diterbitkan di lingkungan Polri.  <b><u>RUMUS :</u></b> Jumlah NPHPW yang diterbitkan (Satker Mapolda, Polres dan Mabes).  <b><u>TIPE PERHITUNGAN :</u></b> Jumlah.	280 NPHPW	300 NPHPW	320 NPHPW	340 NPHPW	380 NPHPW

**ALASAN .....**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI – UTAMA</b>						
	<p><b><u>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</u></b></p> <p>Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW) merupakan nota yang diterbitkan oleh Kapuskeu Polri kepada Kuasa PA, dengan tembusan kepada Irwasum Polri dan Kapolda (untuk Satker Kewilayahan) apabila dalam verifikasi tidak ditemukan kekurangan dan/atau kesalahan dalam dokumen Perwabkeu.</p> <p>Adapun lingkup verifikasi Perwabkeu dari Kabidkeu, yaitu mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kesesuaian mekanisme pembayaran dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>hak atas tagihan telah dibayarkan kepada yang berhak;</li> <li>pengeluaran telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.</li> </ol>					
	<p>IKP 3 Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian.</p> <p><b><u>RUMUS :</u></b></p> <p><i>Jumlah</i> Satker yang memperoleh penilaian Efektif atau Efektif dengan pengecualian  <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <i>Jumlah</i> Satker yang melakukan penilaian PIPK x 100%</p>	15%	25%	35%	45%	55%

TIPE .....



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
			<p><b><u>TIPE PERHITUNGAN :</u></b> % (Persentase).</p> <p><b><u>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</u></b></p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat agar Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Penanggung jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran, termasuk Menteri Keuangan RI atas nama Pemerintah Pusat, membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang disampaikan</p>					
SS 3	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel	IKP 4	<p>Persentase Penyelesaian Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM).</p> <p><b><u>RUMUS :</u></b> <i>Jumlah penyelesaian TKTM atas pengadaan/proyek dalam 1 Tahun anggaran berjalan</i></p> <hr/> <p>X 100%</p> <p><i>Jumlah keseluruhan pengadaan/proyek dalam 1 Tahun anggaran berjalan</i></p> <p><b><u>TIPE PERHITUNGAN :</u></b> % (Persentase)</p>	100%	100%	100%	100%	100%

**ALASAN .....**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI - UTAMA</b>								
			<p><b><u>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</u></b></p> <p>Laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan organisasi pada periode tertentu. Laporan Keuangan Polri terdiri dari: Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Pengadaan/proyek dikatakan selesai jika proses pengadaan atau proyek tersebut telah menghasilkan Asset (BMN) untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian TKTM. Adapun penyelesaian TKTM diawali dengan proses Transfer Keluar yang dilakukan oleh Puskeu Polri untuk kemudian dilakukan pencatatan Transfer Masuk oleh Satker Pelaksana Pengadaan. Keseluruhan proses tersebut dicatat dalam aplikasi SAKTI.</p>					
SS 4	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabas dan Wilayah.	IKP 5	<p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri.</p> <p><b><u>RUMUS :</u></b></p> <p>Penilaian dari Kementerian Keuangan RI, Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut: (2022)</p>	95,25	95,5	95,75	96	96,25

Revisi .....



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI - UTAMA</b>						
	Revisi DIPA : 10 % , Deviasi Halaman III DIPA : 10 %, Penyerapan Anggaran : 20 %, Belanja Kontraktual : 10 %, Penyelesaian Tagihan : 10 %, Pengelolaan UP dan TUP : 10 %, Dispensasi SPM : 5 %, Capaian <i>Output</i> : 25 %. <b><u>TIPE PERHITUNGAN :</u></b> Nilai.  <b><u>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</u></b> Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai kinerja dan bobot dari seluruh indikator kinerja berdasarkan data transaksi yang dilakukan pada tingkat Satker.					
	IKP 6 Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA $\geq$ 93,75.  <b><u>RUMUS :</u></b> $\frac{\text{Jumlah Satker yang mendapat nilai IKPA} \geq 93,75}{\text{Jumlah seluruh Satker Polri}} \times 100\%$	80%	81,5%	83%	85%	87%

TIPE .....



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029		
<b>IKU PUSKEU POLRI - UTAMA</b>								
		<p><b><u>TIPE PERHITUNGAN :</u></b> % (Persentase)</p> <p><b><u>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</u></b> Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai kinerja dan bobot dari seluruh indikator kinerja berdasarkan data transaksi yang dilakukan pada tingkat Satker.</p>						
SS 5	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	IKP 7	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri.</p> <p><b><u>RUMUS :</u></b> Nilai AKIP Puskeu Polri oleh Itwasum Polri.</p> <p><b><u>TIPE PERHITUNGAN :</u></b> Nilai.</p> <p><b><u>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</u></b> Definisi Indikator Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian AKIP meliputi lima komponen, yaitu:</p>	80,1 (A)	80,2 (A)	80,3 (A)	80,4 (A)	80,5 (A)

1. Perencanaan .....

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI - UTAMA</b>						
	1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Internal; 5. Capaian Kinerja; 6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Nilai AKIP yang diperoleh pada tahun berjalan merupakan hasil penilaian atas evaluasi dokumen SAKIP tahun sebelumnya.					
	<b>IKP 8</b> Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri. <b>RUMUS :</b> Nilai NKA = $\sum_{i=1}^2 W_i \cdot X_i$ NKA : Nilai Kinerja Anggaran Wi : Bobot dari komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran (W1=50%, W2=50%) Xi : Nilai indeks masing-masing komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran <b>TIPE PERHITUNGAN :</b> Nilai <b>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</b> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. <b>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</b> adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	76,5	76,6	76,7	76,8	76,9

IKP 9 .....



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI - UTAMA</b>						
	<p>IKP 9 Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan.</p> <p><b>RUMUS :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah SDM Fungsi Keuangan yang memiliki sertifikat Keuangan}}{\text{Jumlah total SDM Fungsi Keuangan}} \times 100\%</math></p> <p><b>TIPE PERHITUNGAN :</b> % (Persentase)</p> <p><b>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</b> Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi. Sertifikasi Bendahara ini mencakup Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.</p>	60%	65%	70%	75%	80%
	<p>IKP 10 Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri.</p> <p><b>RUMUS :</b> (0,3K + 0,3D + 0,09R + 0,09P + 0,08 Kes + 0,07 J + 0,07 Ak)</p> <p><b>TIPE PERHITUNGAN :</b> Nilai</p> <p><b>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</b> Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polri, Indeks Profesionalitas SDM Polri adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	71	72	73	74	75

Pengukuran .....

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI – UTAMA</b>								
			<p>Pengukuran <b>Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri</b> tidak hanya bermanfaat bagi sebuah organisasi atau instansi pemerintah, melainkan juga para pegawai juga masyarakat. Bagi pegawai yang diukur, <b>Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri</b> merupakan area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai negeri pada Puskeu Polri. Bagi instansi pemerintah, pengukuran ini digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai negeri pada Puskeu Polri secara organisasional. Yang terakhir bagi masyarakat, manfaatnya adalah sebagai instrumen kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.</p>					
		IKP 11	<p>Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri.</p> <p><b>RUMUS :</b> Jumlah pelaksanaan Anev dokumen pembinaan fungsi di lingkungan Puskeu Polri.</p> <p><b>TIPE PERHITUNGAN :</b> Jumlah</p> <p><b>ALASAN DIPILIH MENJADI INDIKATOR :</b> Analisa dan evaluasi terhadap dokumen pembinaan fungsi di lingkungan Puskeu Polri digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam</p>	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men

penerapannya .....

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU PUSKEU POLRI - UTAMA</b>						
	penerapannya untuk menjaga kerelevansian dan memastikan bahwa sistem dan metode lain di luar SOP Bid Dal, dan prosedur yang digunakan tetap efektif, efisien, dan relevan dalam mendukung pengelolaan anggaran dan keuangan Polri. Pelaksanaan Anev secara rutin juga membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan mengurangi risiko dalam pelaporan dan pelaksanaan anggaran.					

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 4 Februari 2025

**KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI**

